



Bawuran Tersendat, Jogja Cari Skenario Lain

JOGJA-Tersendatnya pembangunan tempat pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran di Bantul memaksa Pemkot Jogja kembali memikirkan alternatif pembangunan sampah.

Pemkot Jogja kini berencana membangun pengolahan sampah berskala kecil di beberapa titik. Skenario tersebut diharapkan mengurangi timbunan sampah di depo. Penjabat Walikota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan rencana menghadirkan pengolahan sampah berskala kecil di beberapa tempat pengolahan sampah berskala kecil di Bantul. Sebelumnya, Pemkot Jogja sudah beres-tes dengan Pemkab Bantul dalam pengolahan sampah. Kesepakatan itu menyebut Jogja akan mengimpor 60 ton sampah per hari ke ITF Bawuran. Volume tersebut mencakup hampir separuh sampah harian di Jogja yang saat ini rata-rata 200 ton.

Rencana menghadirkan pengolahan sampah berskala kecil di beberapa tempat pengolahan sampah berskala kecil di Bantul. Sebelumnya, Pemkot Jogja sudah beres-tes dengan Pemkab Bantul dalam pengolahan sampah. Kesepakatan itu menyebut Jogja akan mengimpor 60 ton sampah per hari ke ITF Bawuran. Volume tersebut mencakup hampir separuh sampah harian di Jogja yang saat ini rata-rata 200 ton.

Pembangunan ITF Bawuran membutuhkan anggaran senilai Rp17 miliar.

Bawuran Tersendat...

"Kami akan kelola titik depo misalnya di Tompevan, Pasar Demangan atau yang lain. Di sana akan dibuat pengolahan sampah kecil, jadi tidak semua sampah masuk ke TPSR (tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle)," kata Sugeng, Minggu (7/7).

Da menangkan tiap pengolahan sampah skala kecil itu bisa menampung lima ton per hari. Ditambah dengan pengolahan sampah di TPSR Nilikan, Karangmiri, dan Kranon, ratusan ton sampah di Kota Jogja bisa diolah tiap hari.

"Karena ITF Bawuran belum siap, kami lebih menekankan agar fasilitas yang sudah ada di Jogja dimanfaatkan. Misalnya di Nilikan, Karangmiri dan Kranon," jelas dia.

Sugeng mengakui TPSR di Jogja belum selesai pembangunannya sehingga belum bisa maksimal mengolah sampah. "Kami konsentasi ke sana dulu sambil menunggu Bawuran siap," ujar dia.

Jogja juga masih mengirim sampah ke TPA Pyunggan. Namun, Sugeng memisahkan sampah tersebut tidak sekadar dibuang, tetapi juga diolah.

"Saya juga sudah minta menambah armada agar sampah yang dibuang ke depo tidak menumpuk," kata dia.

ITF Bawuran

Sementara itu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma akhirnya menjelaskan mandeknya pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran.

Perusahaan pelat merah itu menegaskan tidak ada penghentian pembangunan ITF, meskipun pembangunan ITF terkendala dana karena tidak menggunakan APBD Kabupaten Bantul.

Direktur Perumda Aneka Dharma Yuli Budi Sasongko mengungkapkan sampai saat ini perusahaannya masih berusaha untuk membangun ITF Bawuran. Namun, belum ada penyerahan modal dari APBD Kabupaten Bantul.

Pembangunan ITF Bawuran

membutuhkan anggaran senilai Rp17 miliar. Sementara penyerahan modal yang seharusnya diberikan oleh Pemkab Bantul pada Aneka Dharma pada 2024 mengacu Pasal 7 Perda No 8/2022 tentang Penyerahan Modal Daerah pada BUMD adalah Rp2 miliar.

Pasal tersebut juga menyebut penyerahan modal daerah pada Aneka Dharma ditetapkan sebanyak Rp20 miliar. Pemkab telah menyerahkan modal daerah pada Aneka Dharma sampai tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar.

Pemkab Bantul menyerahkan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan perticinan pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 Rp2 miliar, dan tahun anggaran 2026 Rp1,98 miliar.

"Di 2024 ini kami belum menerima penyerahan modal dari APBD Kabupaten Bantul. Terus dana membangun ITF dari mana? Ada yang pakai Aneka Dharma, ada juga dari investor. Terus terang kami sedang berusaha untuk terus mencari pendanaan," kata Yuli kepada Harian Jogja, Sabtu (6/7) sore.

Karena persoalan tersebut, pembangunan ITF pun melambat. Yuli mengatakan pembangunan ITF disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan. Kami sedang berusaha mengejar agar ITF Bawuran bisa dioperasikan pada September, meskipun secara fisik saat ini baru 30 persen. Kami tetap akan jalan, meskipun hanya ada lima pekerja yang membangun konstruksi untuk ITF," imbuh Yuli.

Saat ini ada beberapa alat pengolahan sampah yang diletakkan di lokasi pembangunan ITF. Namun, alat tersebut masih sebagian. Ada 17 rangkaian alat yang sebagian masih dirakit di Sidoarjo, dan baru akan dikirim saat infrastruktur bangunan ITF telah selesai dibangun.

"Jadi yang dikirim baru tiga.

Kemarin saya ke Sidoarjo untuk mengecek dan melihat perkembangan perkiraan alatnya," ungkap Yuli.

Kerja Sama

Yuli mengungkapkan perusahaannya terus berkomunikasi dengan Pemkot Jogja untuk melaporkan perkembangan pembangunan ITF, permasalahan pembangunan, dan kemungkinan mundurnya target pengoperasian.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Kota Jogja dan mereka mau menerima. Saat ini ITF Bawuran belum siap," ucap Yuli. Sebelumnya, Sekda Bantul sekaligus Komisaris Perumda Aneka Dharma Agus Budi Raharjo mengatakan kerja sama pengolahan sampah antara Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul masih sebatas memorandum of understanding (MoU). Perjanjian tersebut juga harus ditandatangani dengan penandatanganan kerja sama (PKS) antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja serta Perumda Aneka Dharma dengan Pemkot Jogja.

"Ini semua akan didetailkan di PKS. Nanti ada beberapa skema yang diambil oleh Pemkot Jogja dengan Aneka Dharma," imbuh Agus.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo berharap agar Aneka Dharma bisa segera menyelesaikan pembangunan ITF Bawuran mengingat telah ada MoU antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja.

Adapun Ketua Komisi C DPRD Bantul, Dwi Kristianto, mengakui ada sedikit kendala, yang membuat kemungkinan target pembangunan selesai pada September 2024 mundur. Komisi C saat ini terus mendorong DLH untuk berkoordinasi dengan Perumda Aneka Dharma agar pembangunan ITF Bawuran segera terselesaikan.

"Kami akan kejar terus. Anggaran sampai target selesai. Begitu juga soal pembangunan TPS Sementara di Srimartani, Pyunggan. Kami minta untuk yang Pyunggan harus diselesaikan dengan warga. Jika kesulitan, silakan cari tempat lain," ucap Dwi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005